



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 31 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

NOMOR : 17/RENJA –MAA/2025

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 85);
14. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja PD Tahun 2026 memuat Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

- (3) Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- (4) Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. Bab V : Penutup
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Nomor Renja PD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Oktober 2025 M
6 Jumadil Awal 1447 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Oktober 2025 M
6 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HARIS

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NOMOR RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4
1	01/RENJA-MPD/2025	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
2	02/RENJA-PK/2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	03/RENJA-DINKES/2025	Dinas Kesehatan	
4	04/RENJA-PUPR/2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5	05/RENJA-BPBD/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	06/RENJA-SATPOL PPWH/2025	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
7	07/RENJA-DINSOS/2025	Dinas Sosial	
8	08/RENJA-DP3AP2KB/2025	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
9	09/RENJA-DISTANAH/2025	Dinas Pertanahan	
10	10/RENJA-DLH/2025	Dinas Lingkungan Hidup	
11	11/RENJA-DISDUKCAPIL/2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	12/RENJA-DPMG/2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
13	13/RENJA-DISHUB/2025	Dinas Perhubungan	
14	14/RENJA-DISKOMINFO/2025	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
15	15/RENJA-DPMPTSP NAKER/2025	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
16	16/RENJA-DISPORAPAR/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
17	17/RENJA-MAA/2025	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
18	18/RENJA-DISPUSIP/2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
19	19/RENJA-DKPPP/2025	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	

NO	NOMOR RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4
20	20/RENJA-DISPERINDAGKOP/2025	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopcrasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
21	21/RENJA-SETDAKO/2025	Sekretariat Daerah	
22	22/RENJA-SETWAN/2025	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	
23	23/RENJA-BAPPEDA/2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
24	24/RENJA-BPKD/2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
25	25/RENJA-BKPSDM/2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
26	26/RENJA-INSPEKTORAT/2025	Inspektorat	
27	27/RENJA-BANDA SAKTI/2025	Kecamatan Banda Sakti	
28	28/RENJA-BLANG MANGAT/2025	Kecamatan Blang Mangat	
29	29/RENJA-MUARA SATU/2025	Kecamatan Muara Satu	
30	30/RENJA-MUARA DUA/2025	Kecamatan Muara Dua	
31	31/RENJA-KESBANGPOL/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
32	32/RENJA-MPU/2025	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
33	33/RENJA-BAITUL MAL/2025	Sekretariat Baitul Mal	
34	34/RENJA-DSIPD/2025	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	



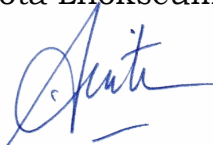
WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas kehendak-Nya lah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan membandingkan antara target sasaran kinerja dengan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan menggunakan data yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga dihasilkan besaran capaian kinerjanya. Disadari bahwa dalam penyusunannya belum sempurna, hal ini disebabkan kemampuan dan cara pandang yang berbeda sehingga diperlukan persamaan cara pandang yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, Oktober 2025
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



Shari Anita, S. Sos, MM

NIP.197810292005042002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK	II-20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional/ Provinsi	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-4
3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	II-7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPK	II-18
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan	II-20
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Darah.....	III-4
Tabel 3.2	Target Indikator Kinerja Daerah Renja Perangkat Darah.....	III-5
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Darah.....	III-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran, dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan awal RKPD. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang

diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRD.

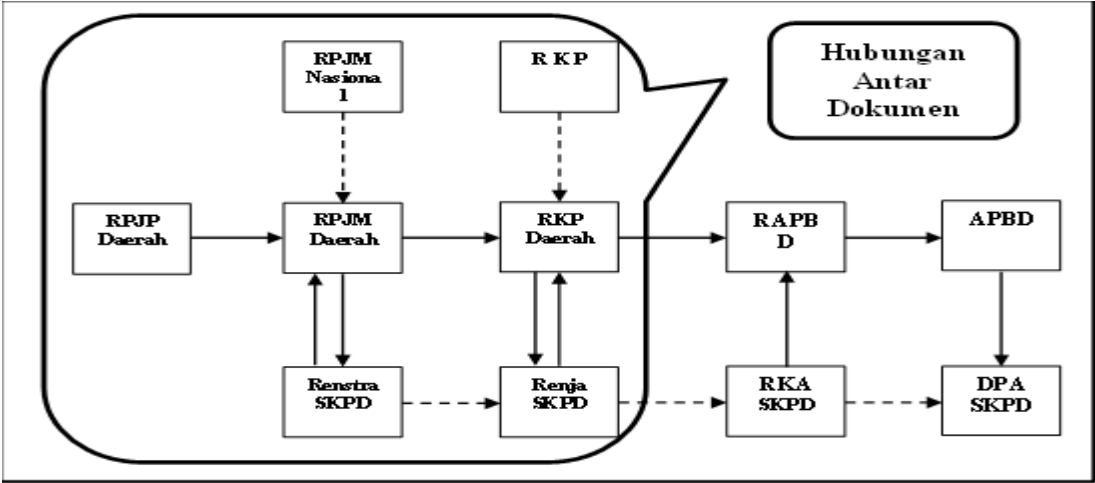
Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe melalui tahapan-tahapan:

- 1) Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2025, pengendalian kegiatan tahun 2025, dan RKPD 2025)
- 2) Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Bidang Perencanaan
 - Desk dengan pengampu kegiatan
- 3) Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe
- 4) Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusunan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe
 - Diverifikasi oleh Bappeda
 - Direview oleh Tim APIP
- 5) Penetapan



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe tahun 2026 dan berpedoman pada Rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.



Gambar 1.2

Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan persiapan Rancangan Awal Rancangan Forum PD/Lintas PD Penetapan Rancangan Akhir tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah

untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
12. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
15. Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
20. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/1/SE/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Majelis Adat Kota Lhokseumawe secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2026 berdasarkan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2026.
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2026.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menguraikan tentang pengertian ringkas Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, dan IKK yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini menguraikan tentang sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan tentang hasil kajian atas program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi, LSM, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan

informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bagian ini menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan (jumlah program, jumlah kegiatan, dan subkegiatan; lokasi, kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang rencana kerja yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan serta pendanaan indikatif sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Bab III subbab 3.3.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan dana tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rentsra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan;
- 2) Program Majelis Adat Aceh, dengan 3 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan;

Target Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Rp. 1.471.660.760,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.563.537.224,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar 96,36% yang termasuk dalam katagori pr edikat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang mengacu pada Tabel 2.1, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

A. Realisasi yang tidak memenuhi target kinerja

Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe mampu menargetkan semua capaian kinerja sehingga realisasi anggaran terserap dengan baik.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

a. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp.7.989.100,- atau 99,85% dengan output jumlah dokumen buku renja, renja perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan dan LKjIP Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe sebanyak 7 dokumen atau 100%.
2. administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
- penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 809.489.107,- terealisasi sebesar Rp. 806.706.704,- atau 90,19% dengan output jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 9 OB (orang bulan) selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
3. administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.961.600,- atau 99,79% dengan output jumlah paket peralatan dan peralatan kantor yang disediakan 30 jenis selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
 - penyediaan bahan logistik kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi sebesar Rp 3.705.000,- atau 92,63% dengan output jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 123,5 porsi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau 100% dengan output jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 30 jenis selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.140.000,- terealisasi sebesar Rp 1.140.000,- atau 100% dengan output jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak (1 eks x 365 hari) sebanyak 365 eks atau 12 bulan atau 100%.
 - penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 64.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.788.400,- atau 99,94% dengan output jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
4. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
- penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1000.000,- atau 100% dengan dengan output jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan selama 12 bulan atau terealisasi 100%.
 - penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 467.522.880,- terealisasi sebesar Rp. 435.843.120,- atau 96,88% dengan output jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebanyak 12 laporan atau 100%.
5. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.200.00,- atau 100% dengan output jumlah kendaraan perorangan dinas sebanyak 1 unit terealisasi selama 1 unit atau 100%.

- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.600.000,- atau 100% dengan output jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau 100%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.920.000,- atau 99,17% dengan output Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau 100%.
- b. program majelis adat aceh (maa) terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
1. kegiatan pelestarian dan pembinaan adat istiadat terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
 - pembinaan adat seumapa/narit maja, meunasib dan tarian tradisional dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.685.000,- atau 99,55% dengan output jumlah laporan pembinaan adat seumapa sebanyak 3 laporan terealisasi sebanyak 3 laporan atau 100%.
 - permasyarakatan do da idi dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.415.000,- atau 98,74% dengan output Jumlah lembaga Permasyarakatan adat do da di idi sebanyak 2 lembaga terealisasi sebanyak 2 lembaga atau 100%.
 - sosialisasi adat istiadat dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.417.500,- atau 99,11% dengan output jumlah peserta sosialisasi adat istiadat sebanyak 50 orang terealisasi sebanyak 50 orang atau 99,11%.

- publikasi adat istiadat melalui media luar ruang dari rencana anggaran sebesar Rp 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp 17.770.000,- atau 73,93% dengan output jumlah peusujuk adat budaya daerah sebanyak 10 kali terealisasi sebanyak 8 kali atau 73,93%.
2. kegiatan pembinaan dan pengembangan hukum adat terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - penguatan peradilan adat dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.578.300,- atau 98,74% dengan output Jumlah peserta pelatihan peradilan adat sebanyak 30 orang terealisasi sebanyak 30 orang atau 98,74%.
 3. kegiatan pembinaan lembaga adat dan tokoh adat terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - pelatihan pemberdayaan lembaga adat dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.817.500,- atau 99,45% dengan output jumlah peserta pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat sebanyak 30 orang terealisasi sebanyak 30 orang atau 99,45%.
- C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Pada tahun 2024 Sekretariat Majelis Adat Kota Lhokseumawe tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
- D. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.
- Tahun 2024 tidak semua program/kegiatan tercapai dan terpenuhi target kinerjanya sesuai dengan penyusunan rencana anggaran karena pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2024 tidak tersedianya anggaran sehingga ada kegiatan yang dimatikan atau dialihkan pada kegiatan yang lebih prioritas, ada juga sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan secara fisik 100%.

Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

- E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan tercapainya target program yang telah direncanakan akan memberikan dampak positif pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, namun jika target capaian tidak sesuai yang diharapkan akan mengurangi capaian kinerja secara keseluruhan.

- F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adalah dengan meminta pembukaan kembali terhadap rekening kegiatan yang telah dialihkan dan menambah anggaran untuk beberapa kegiatan yang telah mencapai target di tahun sebelumnya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Sekretariat MAA sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKEUMAWA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Kinerja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Tolok Ukur	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	
1					2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
					SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH			8.337.936.034		1.383.375.755		1.349.151.070		1.563.537.224		-		1.563.537.224	-	4.510.450.203			54,10%
														-		-		-					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.337.936.034		1.383.375.755		1.349.151.070		1.563.537.224		-		1.563.537.224	-	4.510.450.203			54,10%
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.337.936.034		1.383.375.755		1.349.151.070		1.563.537.224		-		1.563.537.224	-	4.510.450.203			54,10%
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	7.097.687.890		1.334.190.390	100	1.295.757.895	50	1.397.853.924	50	-	100	1.499.817.234	100	4.231.861.548	100,00%	59,62%
2	22	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	28.733.128	3	13.375.700	3	13.385.000	0	7.989.100	3	60%	3	7.989.101	6	29.353.901	6,32%	102,16%
2	22	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku Renstra dan renja	Buku	10	26.400.000	10	13.375.700	10	13.385.000	0	7.989.100	0	60%	0	7.989.101	10	29.353.901	100,00%	111,19%
2	22	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	10	400.000	10	-	10	-	10	-	1	0%	11	-	10	-	100,00%	0,00%
2	22	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	10	400.000	10	-	10	-	10	-	1	0%	11	-	10	-	100,00%	0,00%

1					2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
2	22	01		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	10	400.000	10	-	10	-	10	-	1	0%	11	-	10	-	100,00%	0,00%
2	22	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	10	400.000	10	-	10	-	10	-	1	0%	11	-	10	-	100,00%	0,00%
2	22	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Dokumen	10	733.128	10	-	10	-	10	-	1	0%	11	-	10	-	100,00%	0,00%
2	22	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan	Persen	98	3.509.956.428	12	742.543.740	12	719.384.540	6	806.706.704	0,5	-	6,5	806.706.704	19	2.355.957.148	18,88%	67,12%
2	22	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	OB	126	3.509.156.428	126	742.543.740	140	719.384.540	70	806.706.704	0,5	112%	70,5	806.706.705	126	2.355.957.149	100,00%	67,14%
2	22	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	OB	126	400.000	126	-	140	-	70	-	0,5	0%	70,5	-	126	-	100,00%	0,00%
2	22	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	OB	126	400.000	126	-	140	-	70	-	0,5	0%	70,5	-	126	-	100,00%	0,00%

1				2		3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
126																						100,00%	0,00%
Predikat Kinerja																						ST	SR
2	22	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	Persen	95	255.260.000	6	86.197.770	12	108.412.795	6	82.595.000	0,5	5	6,5	82.595.005	13	251.387.775	13,16%	98,48%
2	22	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Penyediaan ATK	Jenis	75	40.000.000	2	8.679.720	4	8.962.395	2	8.961.600	0,5	100%	2,5	8.961.601	75	26.602.921	100,00%	66,51%
2	22	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jenis	75	400.000	2	-	4	-	2	-	0,5	0%	2,5	-	75	-	100,00%	0,00%
2	22	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Porsi	500	20.000.000	94	4.000.000	216	3.995.000	108	3.705.000	0,5	93%	108,5	3.705.001	500	11.410.001	100,00%	57,05%
2	22	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	15	24.500.000	15	4.868.700	12	4.737.500	6	5.000.000	0,5	106%	6,5	5.000.001	15	14.868.701	100,00%	60,69%
2	22	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	730	4.560.000	730	1.140.000	730	1.140.000	365	1.140.000	0,5	100%	365,5	1.140.001	730	3.420.001	100,00%	75,00%
2	22	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Jenis	730	400.000	730	-	730	0	365	-	0,5	0%	365,5	-	730	-	100,00%	0,00%
2	22	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Negri	Jenis	10	165.400.000	0	67.509.350	20	89.577.900	10	63.788.400	0,5	71%	20	63.788.401	10	195.086.151	100,00%	117,95%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100,00%	53,88%
Predikat Kinerja																						ST	R
2	22	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	96.450.000	12	-	12	-	6	-	0,5	-	6,5	-	19	-	19,47%	0,00%

1					2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
2	22	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit	4	400.000	12	-	12	0	6	-	0,5	0%	6,5	-	19	-	462,50%	0,00%
2	22	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	4	400.000	12	-	12	0	6	-	0,5	0%	6,5	-	19	-	462,50%	0,00%
2	22	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang dDisediakan (Unit)	Unit	4	31.100.000	19	-	1	0	0	-	0	0%	0	-	19	-	475,00%	0,00%
2	22	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	4	30.100.000	12	-	12	0	6	-	0,5	0%	6,5	-	19	-	462,50%	0,00%
2	22	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	4	34.450.000	19	-	1	0	0	-	0	0%	0	-	19	-	475,00%	0,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						467,50%	0,00%
Predikat Kinerja																						ST	SR
2	22	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya administrasi perkantoran	Persen	95	1.690.099.040	12	430.803.620	12	400.666.010	6	436.843.120	0,5	-	6,5	436.843.120	19	1.304.489.860	19,47%	77,18%
2	22	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	Surat	20	7.000.000	20	1.000.000	200	1.000.000	100	1.000.000	0,5	100%	100,5	1.000.001	40	3.000.001	200,00%	42,86%
2	22	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	RB	24	24.000.000	24	2.115.000	12	5.031.250	6	-	0,5	0%	6,5	-	31	2.115.000	127,08%	8,81%
2	22	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	RB	24	60.100.000	24	-	12	0	6	-	0,5	0%	6,5	-	31	-	127,08%	0,00%

1					2	3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pejabat Pengelola keuangan OPD (11 orang x 12 bulan) dan jumlah Pegawai Tidak tetap dan Jumlah Pengurus MAA	OB	516	1.598.999.040	516	427.688.620	516	394.634.760	258	435.843.120	0,5	110%	258,5	435.843.121	775	1.299.374.861	150,10%	81,26%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						151,07%	33,23%
Predikat Kinerja																						ST	SR
2	22	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	276.941.150	12	61.269.560	12	53.909.550	6	63.720.000	0,5	3	6,5	63.720.003	19	188.709.563	19,47%	68,14%
2	22	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Berkala kendaraan Dinas Jabatan (1 unit x 12 Bulan)	UB	12	137.100.000	12	32.602.300	12	25.688.350	6	33.200.000	0,5	129%	6,5	33.200.001	19	99.002.301	154,17%	72,21%
2	22	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan Dinas Operasional (1 unit x 12 bln)	UB	12	127.100.000	12	23.667.300	12	23.499.085	6	25.600.000	0,5	109%	6,5	25.600.001	19	74.867.301	154,17%	58,90%
2	22	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	19	12.741.150	19	4.999.960	1	4.722.115	0	4.920.000	0	104%	0	4.920.001	19	14.839.961	100,00%	116,47%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						136,11%	82,53%
Predikat Kinerja																						ST	T
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	Persen	50	1.240.248.144	100	49.185.365	100	53.393.175		165.683.300	0	5	0	165.683.305	100	380.551.970	200,00%	30,68%
2	22	07	2,01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Meningkatkan Jumlah kaderisasi Adat Aceh	Persen	95	620.807.756	5	26.891.400	5	22.000.560		126.287.500	0	5	0	126.287.505	5	279.466.405	5,26%	45,02%
2	22	07	2,01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	Laporan	100	142.000.000	100	-	50	0		49.685.000	0	0	0	49.685.000	100	99.370.000	100,00%	69,98%
2	22	07	2,01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan	100	104.000.000	100	-	50	0		29.415.000	0	0	0	29.415.000	100	58.830.000	100,00%	56,57%

1					2		3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
2	22	07	2,01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Adat Istiadat	Peserta	100	150.000.000	100	14.891.400	50	16.064.560		29.417.500	0	1,8312	0	29.417.502	100	73.726.402	100,00%	49,15%	
2	22	07	2,01	04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	Orang	100	64.807.756	100	-	50	0		-	0	0	0	-	100	-	100,00%	0,00%	
2	22	07	2,01	05	Pengadaan Buku-buku Tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-buku Tentang Adat Aceh (Buku)	Buku	100	40.000.000	100	-	50	0		-	0	0	0	-	100	-	100,00%	0,00%	
2	22	07	2,01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah pelaksanaan Acara Adat Budaya Daerah	kali	5	120.000.000	0	12.000.000	6	5.936.000		17.770.000	0	2,9936	0	17.770.003	-	47.540.003	0,00%	39,62%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						75,00%	22,19%	
Predikat Kinerja																						S	SR	
2	22	07	2,02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Meningkatkan Jumlah Penggunaan Hukum Kearifan Lokal	Persen	95	324.000.000	12	9.969.000	12	9.895.400		19.578.300	0	-	0	19.578.300	12	49.125.600	12,63%	15,16%	
2	22	07	2,02	01	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Penguatan Peradilan Adat (Orang)	Peserta	68	120.000.000	68	-	5	-		19.578.300	0	-	0	19.578.300	68	39.156.600	100,00%	32,63%	
2	22	07	2,02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Kasus Peradilan adat	Kasus	68	95.000.000	68	9.969.000	5	9.895.400		-	0	-	0	-	68	9.969.000	100,00%	10,49%	
2	22	07	2,02	03	Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	Kasus	68	20.000.000	68	-	5	-		-	0	-	0	-	68	-	100,00%	0,00%	
2	22	07	2,02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	Orang	68	89.000.000	68	-	5	-		-	0	-	0	-	68	-	100,00%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																						ST	SR	
2	22	07	2,03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Rentang waktu pembinaan lembaga adat dan tokoh adat	Persen	95	295.440.388	12	12.324.965	12	21.497.215		19.817.500	0	-	0	19.817.500	12	51.959.965	12,63%	0,00%	

1					2		3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
2	22	07	2.03	01	Pembinaan Kapasitas MAA	Jumlah Peserta Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	Peserta	12	20.000.000	0	-	100	0		-	0	0	100	-	100	-	833,33%	0,00%	
2	22	07	2.03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	Peserta	12	65.140.388	0	-	100	0		19.817.500	0	0	100	19.817.500	100	39.635.000	833,33%	0,00%	
2	22	07	2.03	03	Rapat Kerja MAA	Jumlah peserta rapat kerja	Bulan	12	40.300.000	0	12.324.965	100	21.497.215		-	0	0	100	-	100	12.324.965	833,33%	0,00%	
2	22	07	2.03	04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	Buku	12	100.000.000	0	-	100	0		-	0	0	100	-	100	-	833,33%	0,00%	
2	22	07	2.03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	Orang	12	25.000.000	0	-	100	0		-	0	0	100	-	100	-	833,33%	0,00%	
2	22	07	2.03	06	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	Kasus	12	20.000.000	0	-	100	0		-	0	0	100	-	100	-	833,33%	0,00%	
2	22	07	2.03	07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	Unit	12	25.000.000	0	-	100	0		-	0	0	100	-	100	-	833,33%	0,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					833,33%	0,00%		
Predikat Kinerja																					ST	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					87,50%	11,10%		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					T	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																					#REF!	#REF!		
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																					#REF!	#REF!		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 03 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe, Bab IV Bagian Kesatu Pasal 10 sampai dengan 12, dengan jelas disebutkan tugas Sekretariat MAA memberikan pelayanan administratif kepada lembaga Majelis Adat Aceh.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat MAA;
- b. fasilitas penyiapan program MAA;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAA;
- e. penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
- f. pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup MAA;
- g. penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MAA;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA dan/atau Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2024 Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe memberi kontribusi terhadap pencapaian dalam pelaksanaan urusan kebudayaan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat MAA dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C.30) berikut ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	Indikator Kinerja Daerah											
1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah			100	100	100	100	72	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Sengketa Adat			100	100	100	100	62	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh, isu-isu penting dalam penyelenggaraan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari beberapa unsur.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe; dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Lhokseumawe; serta Isu-isu strategis yang juga termaktub pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP.

Isu strategis bagi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe di masa empat tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 4 (empat) permasalahan inti di Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe yaitu:

1. rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan adat istiadat Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam tatanan kehidupannya sehari-hari;
2. belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi;
3. masih kuatnya pengaruh budaya asing terhadap perilaku generasi muda yang akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai adat dan adat istiadat Aceh, terutama pada prosesi upacara adat, kesenian tradisional dan etika sosial, dimana keberadaan pemuda untuk itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat

4. belum adanya peningkatan capaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masalah tersebut disebabkan karena belum meratanya kualitas SDM perencana pada setiap perangkat daerah dan kurangnya pendanaan penyediaan fasilitas kantor.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai. Rancangan awal RKPK memuat pagu indikatif awal sebelum dibandingkan dengan kebutuhan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe. Setelah dilakukan analisis kebutuhan pagu sesuai dengan kegiatan dan program yang direncanakan, pagu indikatif mengalami perubahan. Perubahan pagu ini disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan untuk beberapa kegiatan dan program yang direncanakan sehingga adanya penambahan pagu setelah hasil analisis.

Review terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.3 (T-C.31).

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekretariat Majelis Adat Aceh				2.038.178.867	Sekretariat Majelis Adat Aceh				1.980.376.406	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.038.178.867	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.980.376.406	
	Kebudayaan				2.038.178.867	Kebudayaan				1.980.376.406	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	1.553.078.867	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	1.754.771.286	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dokumen	7.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dokumen	8.583.282	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	100.000	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan semester SKPD dan Laporan Koordinasi		183.282	

No	Rancangan Awal RPKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	878.389.107	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	977.289.107	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	877.289.107	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	977.089.107	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Semester SKPD		Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	2 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Semester SKPD		Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		100.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	200.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	100.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	100.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	80.340.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	110.340.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.140.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	14 Dokumen	1.140.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	100.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	80.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	10.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	60.100.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	100.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit set tetap lainnya yang disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit set tetap lainnya yang disediakan		10.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 bulan	100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	491.549.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	429.749.760	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132 Laporan	467.549.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	134 Laporan	399.749.760	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 bulan	85.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	168.509.137	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.700.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	55.700.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	19.345.835	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.881.651	

No	Rancangan Awal RPKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	18.881.651	
	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Kota Lhokseumawe	Indek Adat Istiadat Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	Kegiatan	485.100.000	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Kota Lhokseumawe	Indek Adat Istiadat Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	Kegiatan	225.605.120	
	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarian	5 Jenis	260.000.000	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarian	5 Jenis	106.835.120	
	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional		Jumlah laporan pembinaan adat seumapa/narit maja meunasib dan tarian tradisional	3 Laporan	70.000.000	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional		Jumlah laporan pembinaan adat seumapa/narit maja meunasib dan tarian tradisional	3 Laporan	20.000.000	
	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi		Jumlah Peserta Pemasyarakatan do da idi	2 Lembaga	50.000.000	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi		Jumlah Peserta Pemasyarakatan do da idi	2 Lembaga	20.000.000	
	Sosialisasi Adat Istiadat		Jumlah peserta sosialisasi Adat Istiadat	50 orang	50.000.000	Sosialisasi Adat Istiadat		Jumlah peserta sosialisasi Adat Istiadat	50 orang	20.000.000	
	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan		Jumlah keluarga meuadab dan adat perkawinan yang dibina	2 keluarga	30.000.000	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan		Jumlah keluarga meuadab dan adat perkawinan yang dibina	2 keluarga	20.000.000	
	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh		Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Istiadat	1 Buku	10.000.000	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh		Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Istiadat	1 Buku	6.835.120	
	Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang		Jumlah adat istiadat melalui media luar ruang yang dipublikasikan	2 Dokumen	50.000.000	Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang		Jumlah adat istiadat melalui media luar ruang yang dipublikasikan	2 Dokumen	20.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat		Jumlah Pengembangan hukum adat yang dibina	5 jenis	115.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat		Jumlah Pengembangan hukum adat yang dibina	5 jenis	60.000.000	
	Penguatan Peradilan Adat		Jumlah peserta pelatihan peradilan adat	50 orang	30.000.000	Penguatan Peradilan Adat		Jumlah peserta pelatihan peradilan adat	50 Orang	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (POLMAS)		Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi peradilan adat dan perpolisian masyarakat (Polmas)	5 Dokumen	50.000.000	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (POLMAS)		Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi peradilan adat dan perpolisian masyarakat (Polmas)	5 Dokumen	20.000.000	
	Pembinaan Mediasi Adat		Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	3 Laporan	5.000.000	Pembinaan Mediasi Adat		Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	3 Laporan	5.000.000	
	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat		Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	50 orang	30.000.000	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat		Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	50 orang	15.000.000	
	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Lembaga Adat dan Tokoh adat yang dibina	5 jenis	110.100.000	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Lembaga Adat dan Tokoh adat yang dibina	5 jenis	58.770.000	
	Pembinaan Kapasitas MAA		Jumlah peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	20 orang	5.000.000	Pembinaan Kapasitas MAA		Jumlah peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	50 orang	5.000.000	
	Pelatihan Pemberdayaan Kelembaga Adat		Jumlah peserta pelatihan Pemberdayaan kelembaga adat	50 orang	30.000.000	Pelatihan Pemberdayaan Kelembaga Adat		Jumlah peserta pelatihan Pemberdayaan kelembaga adat	50 orang	18.670.000	
	Rapat Kerja MAA		Jumlah Laporan hasil rapat kerja MAA	4 Dokumen	100.000	Rapat Kerja MAA		Jumlah Laporan hasil rapat kerja MAA	4 Dokumen	100.000	
	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat		Jumlah Buku Majalah dan buku tentang adat dan adat istiadat yang diterbitkan	1000 eksemplar	25.000.000	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat		Jumlah Buku Majalah dan buku tentang adat dan adat istiadat yang diterbitkan	1000 eksemplar	20.000.000	
	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat		Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	100 Orang	20.000.000	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat		Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	100 Orang	5.000.000	
	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat		Jumlah kasus sengketa adat yang terdata dan terdokumentasi	5 Kasus	20.000.000	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat		Jumlah kasus sengketa adat yang terdata dan terdokumentasi	5 Kasus	5.000.000	
	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat		Jumlah dan perlengkapan adat	22 unit	10.000.000	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat		Jumlah dan perlengkapan adat	22 unit	5.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kota. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam perencanaan. Proses penjangingan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil. Tabel usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 (T-C.32) berikut ini :

Tabel 2.4 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	0	-
2	-	-	-	0	-
3	-	-	-	0	-

Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan dari usulan masyarakat yang ditujukan kepada Sekretariat MAA selaku Perangkat Daerah maupun usulan pikir. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Keberhasilan pembangunan terlihat dari sejauh apa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dapat dicapai apabila isu isu spesifik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik. Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tema pembangunan yaitu: **“Terwujudnya Lhokseumawe Sebagai Kota Cerdas dan Layak Huni”**. Dijabarkan dalam tema tahunan mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 yaitu:

2026	Pertumbuhan dengan penguatan sektor ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelanjutan
2027	Percepatan Pertumbuhan ekonomi yang didukung pemerataan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana dan berkelanjutan
2028	Penguatan perekonomian dengan penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan social dasar, penerapan syariat islam, pelestarian budaya dan berkelanjutan
2029	Pemantapan pertumbuhan ekonomi didukung dengan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan secara digital dan berkelanjutan
2030	Perwujudan Kota Lhokseumawe sebagai kota cerdas dan layak huni

Selain arah kebijakan makro tersebut, dalam pelaksanaannya untuk Tahun 2025-2029 RPJMK memiliki 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah Ekonomi Digital Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri ;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

Selain prioritas nasional juga memperhatikan prioritas pembangunan Aceh untuk Tahun 2026 seperti yang terkandung dalam RPJMA Tahun 2025-2029 yaitu: **“Aceh Islami, Maju,**

Bermartabat dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 diarahkan untuk peningkatan SDM, pemenuhan hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi masyarakat dan mensukseskan agenda politik pemilihan umum secara serentak.

Sementara itu, untuk mencapai tema pembangunan di atas, maka dirumuskan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026 yaitu :

1. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (aqidah, syariat, akhlak dan muamalah);
2. Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh;
3. Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim;
5. Penciptaan Lapangan Kerja;
6. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas;
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi;
8. Transformasi Digital yang terintegrasi;
9. Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Aceh yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Tahun 2025-2029, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe yaitu: **“Pertumbuhan Dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”** dengan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan
5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Renja Sekretariat MAA Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Renstra Sekretariat MAA Tahun 2026-2030 yaitu **Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya** Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe yaitu : **Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya** dengan indikator **Persentase Kegiatan Pengembangan Budaya**. Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada review Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Ket
1	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		Indeks Pembangunan Syariat	10	
		Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Persentase Kegiatan Pengembangan Budaya	26,9	

Adapun indikator kinerja daerah (IKD) Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Daerah
Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026	Ket
1	Nilai Sakip OPD	Angka	60,75	
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Persen	26,9	

Sumber : Renstra Sekretariat MAA Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa bidang ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sekretariat Majelis Adat Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan Adat dan Budaya dan membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Adat dan Budaya dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan Adat dan Budaya.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. jumlah program yang dilaksanakan pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebanyak 2 program meliputi 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan;
 - b. program majelis adat aceh, dengan 3 kegiatan 4 sub kegiatan.
2. jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja Sekretariat MAA

Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebesar Rp.1.692.691.920,- yang bersumber dari dana APBK Lhokseumawe.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe mempunyai program sebagaimana terlihat pada lampiran tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Sekretariat Majelis Adat Aceh

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Sekretariat Majelis Adat Aceh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
2	22				KEBUDAYAAN										1.980.376.406			2.039.807.233
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.754.771.286			1.524.807.233
2	22	01	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8.583.282			11.928.366
2	22	01	2:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	10 Dokumen	95 Persen	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	5.764.183
2	22	01	2:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	10 Dokumen	95 Persen	100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	5.764.183
2	22	01	2:01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	1 Dokumen	95 Persen	100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000

2	22	01	2:01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 persen	1 Dokumen	95 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 persen	1 Dokumen	95 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 persen	1 Laporan	95 Persen	183.282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								977.289.107					878.389.107
2	22	01	2:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 persen	112 Orang/bulan	98 Persen	977.089.107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	877.289.107
2	22	01	2:02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 persen	1 Dokumen	98 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000

2	22	01	2:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	2 Laporan	98 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	1.000.000
5	01	001	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								200.000					200.000
2	22	01	2:05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	12 Paket	98 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	8 Orang	98 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								110.340.000					60.840.000
2	22	01	2:06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	4 Paket	95 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	10.000.000
2	22	01	2:06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	2 Paket	95 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	5 Paket	95 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	4.000.000
2	22	01	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	5 Paket	95 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	5.500.000

2	22	01	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	12 Dokumen	95 Persen	1.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	1.140.000
2	22	01	2:06	6	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	2 Paket	95 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 Pers en	10 Laporan	95 Persen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	40.000.000
2	22	01	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60.100.000					30.700.000
2	22	01	2:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	1 Unit	1 Unit	95 Persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	1 Unit	1 Unit	95 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000
2	22	01	2:07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Tersedianya Aset tetap lainnya	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	1 Unit	1 Unit	95 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	10.500.000
2	22	01	2:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	1 Unit	1 Unit	95 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	10.000.000
2	22	01	2:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor lainnya yang disediakan	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor lainnya yang disediakan	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	1 Unit	1 Unit	95 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	10.000.000
2	22	01	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								429.749.760				491.549.760	

2	22	01	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	2 laporan	95 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	2.000.000
2	22	01	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	3 laporan	95 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	12.000.000
2	22	01	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	2 Laporan	95 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	10.000.000
2	22	01	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	132 Laporan	95 Persen	399.749.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	467.549.760
2	22	01	2:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									168.509.137	82.100.000				
2	22	01	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	1 Unit	95 Persen	55.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	40.000.000
2	22	01	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	1 Unit	95 Persen	55.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	35.000.000
2	22	01	2:09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	Kota Lhokseuma we, Banda Sakti,	100 persen	1 Unit	95 Persen	19.345.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100.000

2	22	01	2:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 persen	1 Unit	95 Persen	18.881.651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	2.000.000
2	22	01	2:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 persen	7 Unit	95 Persen	18.881.651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	5.000.000
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)								225.605.120				515.000.000
2	22	07	7:01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat								106.835.120				260.000.000
2	22	07	7:01	01	Pembinaan Adat seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/ Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Terlaksananya Kegiatan Seumapa untuk generasi muda	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 Persen	3 laporan	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	70.000.000
2	22	07	7:01	02	Permasyarakatan Adat Do Da Idi	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Lembaga Permasyarakatan Adat Do Da Idi	Terlaksananya kegiatan adat do da idi	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti,	100 Persen	2 Lembaga	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	50.000.000
2	22	07	7:01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe, Kecamatan	100 persen	50 orang	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	50.000.000
2	22	07	7:01	04	Pembinaan Keluarga meudad dan adat perkawinan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Keluarga Meudad dan Adat Perkawinan yang dibina	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe, Kecamatan	100 persen	2 Keluarga	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	30.000.000

2	22	07	7:01	05	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Istiadat	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseuma we, Kecamatan	100 persen	1 Buku	93 Persen	6.835.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	10.000.000
2	22	07	7:01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Terlaksananya peusujuk adat dan adat istiadat yang dipublikasikan	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	2 dokumen	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	50.000.000
2	22	07	7:02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat								60.000.000				115.000.000	
2	22	07	7:02	01	Penguatan Peradilan Adat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah peserta pelatihan peradilan adat gampong	Terlaksananya Peradilan Adat yang diselesaikan digampong	Kota Lhokseuma we, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50 orang	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	30.000.000
2	22	07	7:02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Kasus Peradilan adat	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseuma we, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Dokumen	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	50.000.000
2	22	07	7:02	03	Pembinaan Mediasi Adat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseuma we, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 laporan	93 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	5.000.000

2	22	07	7:02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Tercapainya Jumlah Frekuensi Kegiatan Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Kota Lhokseuma we, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50 orang	93 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	30.000.000
2	22	07	7:03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat								58.770.000				140.000.000	
2	22	07	7:03	01	Pembinaan Kapasitas MAA	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Peserta Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	20 orang	93 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	5.000.000
2	22	07	7:03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	50 orang	93 Persen	18.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	30.000.000
2	22	07	7:03	03	Rapat Kerja MAA	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah peserta rapat kerja	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	4 Dokumen	93 Persen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	40.000.000
2	22	07	7:03	04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	10 Eksemplar	93 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	25.000.000
2	22	07	7:03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	100 Orang	93 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tidak	20.000.000

2	22	07	7:03	06	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	5 Kasus	93 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tid ak	10.000.000
2	22	07	7:03	07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Kota Lhokseuma we, Kecamatan, Banda Sakti	100 persen	22 Unit	93 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada Ada/Tid ak	10.000.000
TOTAL													1.980.376.406				2.039.807.233	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dalam menyusun perencanaan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, mencoba menyusun Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai pedoman utama dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Untuk Tahun 2026 dalam rangka peningkatan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. program penunjang urusan pemerintah daerah:
 - a) perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 1. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) administrasi keuangan perangkat daerah
 1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c) administrasi umum perangkat daerah
 1. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 2. penyediaan bahan logistik kantor;
 3. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 4. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - d) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
 1. penyediaan jasa surat menyurat
 2. penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - e) pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 2. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan;

3. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
2. program majelis adat aceh:
 - a) pelestarian dan pembinaan adat
 1. sosialisasi adat istiadat;
 2. publikasi adat dan adat istiadat melalui media luar ruang;
 - b) pembinaan dan pengembangan hukum adat
 1. penguatan peradilan adat;
 - c) pembinaan lembaga adat dan tokoh adat
 1. pengadaan pakaian dan perlengkapan adat

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/kegiatan (*output*) dan indikator keluaran sub kegiatan serta kelompok sasaran pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ini berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR Kota Lhokseumawe serta hasil evaluasi Gubernur Aceh

c. Rencana Tindak Lanjut

Sedangkan untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

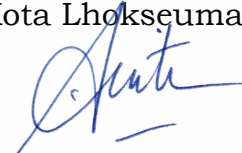
1. perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2026 akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bekerjasama harmonis, berkoordinasi efektif antar dan intra organisasi di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe dan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ini diharapkan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Lhokseumawe, Oktober 2025

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shari Anita', is placed over the printed name.

SHARI ANITA, S.Sos, MM

Nip. 197810292005042002



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351
Email : setmaalhokseumawe@gmail.com Website : maa.lhokseumawekota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2026 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe perlu membentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, tentang pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Citpa Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 3 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam.
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2008, tentang Lembaga Adat.
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Lembaran Kata Lhokseumawe;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 25 Februari 2025

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe,



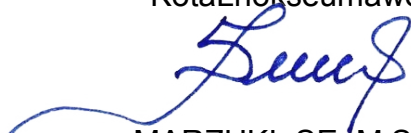
MARZUKI, SE, M.S.M
NIP. 19721231 200801 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN
ANGGARAN 2026
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE.

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
01	02	03	04
1.	Kepala Sekretariat MAA	Ketua	
2.	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
4.	Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi	Anggota	
5.	2 (dua) Orang Staf	Anggota	

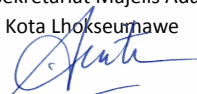
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
KotaLhokseumawe,



MARZUKI, SE, M.S.M
NIP. 19721231 200801 1 014

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Lhokseumawe

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak ada
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi	√			
3	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kab/Kota	√			
4	Mengkaji Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kab/Kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kab/Kota	√			
6	Penelaahan Rancangan awal RKPD Kab/Kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan Usulan Masyarakat	√			
9	Perumusan Kegiatan Prioritas	√			
10.a	Menyelaraskan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kab/Kota	√			
10.c	Mengsinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kab/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kab/Kota sesuai dengan Surat Edaran Bupati/Walikota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Kab/Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kab/Kota	√			
13	Pendanaan Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kab/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kab/Kota telah disahkan	√			

Lhokseumawe, 17 Oktober 2025
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe

SHARI ANITA, S. SOS, MM
NIP. 197810292005042002